

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) diperlukan untuk menyesuaikan arah, tujuan, dan masa depan yang hendak dicapai dalam sebuah organisasi. Perubahan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perubahan perencanaan pembangunan daerah dan menjadi acuan bagi Dinas, Badan atau Unit Kerja Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik lainnya.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pelayanan DPMD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perubahan perencanaan pembangunan harus selaras dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, baik nasional maupun daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya tujuan pembangunan sesuai dengan fungsinya.

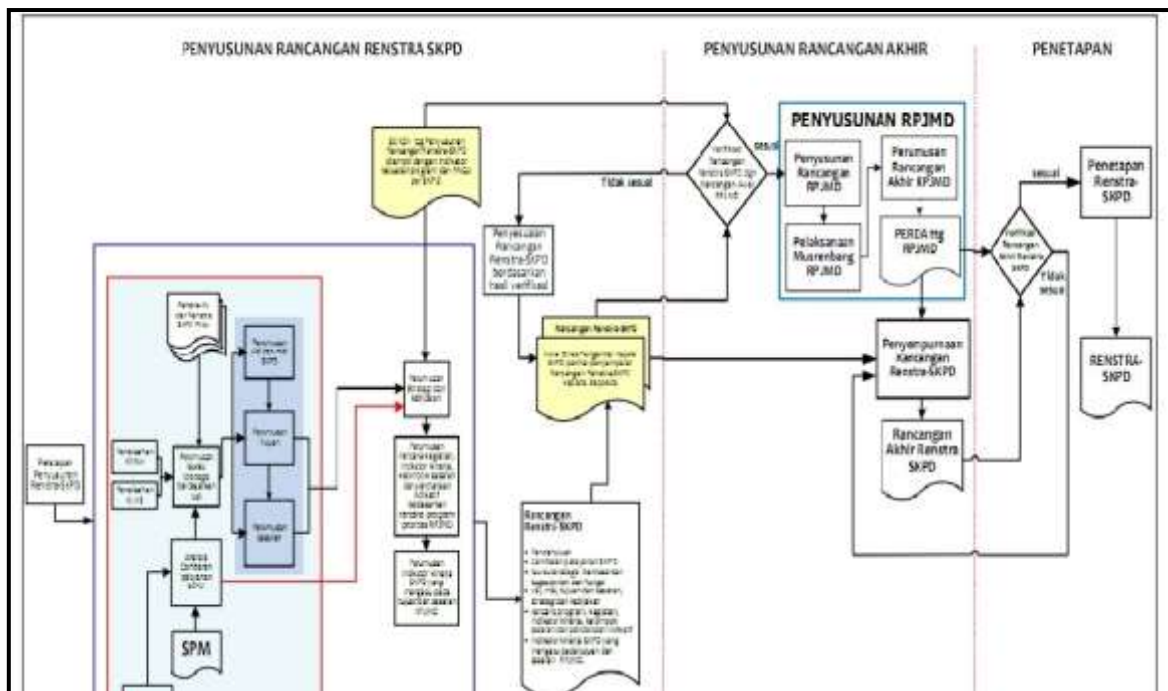
Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang memiliki fungsi diantaranya:

1. Merumuskan kembali tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan Visi, Misi dan Tupoksi DPMD dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitasnya,
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan DPMD sesuai dengan dinamika masyarakat agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat,
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh DPMD,
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan DPMD,
5. Menyediakan dasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme serta menginformasikan perubahan arah pembangunan apabila diperlukan,
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan,

7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah – langkah yang jelas untuk mencapai tujuan,
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja DPMD.

Proses penyusunan perubahan Renstra DPMD melalui 3 pilar yaitu: Alur proses teknoratis – strategis, Alur proses partisipatif dan Alur proses politislegislasi. Alur tersebut disesuaikan dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Gambar 1.1
PROSES PENYUSUNAN RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAMPANG



Renstra DPMD dan RPJMD mempunyai keterkaitan karena merupakan tolak ukur terhadap pencapaian sasaran selama 5 (Lima) tahun kedepan, dengan Renstra K/L juga mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh DPMD yaitu :

- a. Masih tingginya angka kemiskinan
- b. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Masih rendahnya pelaku pemberdayaan di kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa
- d. Rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) dan pemanfaatan potensi lokal.
- e. Serta mengatur dan membina tata kelola pemerintahan desa

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang terkait dengan Pedoman Perencanaan dan penganggaran, TUPOKSI dan Kewenangan DPMD yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 52 Seri E);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 50 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.
28. Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah untuk merumuskan kembali Strategi dan Kebijakan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 serta pelaksanaan unsur Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan sesuai amanat RPJMD yang berada dalam lingkup TUPOKSI Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, yaitu:

1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan desa
2. merumuskan dan menyiapkan kebijakan fasilitasi pelaksanaan sosial budaya dan kelembagaan masyarakat
3. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna
4. Melakukan pengorganisasian penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat
5. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
6. Pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Fungsi Renstra DPMD dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Proses penyusunan Renstra DPMD, Keterkaitan Renstra DPMD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja DPMD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Kewenangan DPMD, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPMD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renstra DPMD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renstra DPMD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DPMD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMD, Struktur Organisasi DPMD serta uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala DPMD. Uraian tentang Struktur Organisasi DPMD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, Jumlah personil dan tata laksana DPMD (proses, prosedur dan mekanisme).

2.2 Sumber Daya DPMD

Memuat Penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan DPMD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMD berdasarkan sasaran/target Renstra DPMD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indicator kinerja pelayanan DPMD dan/atau indicator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi sesuai dengan

urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Memuat Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan tugas dan fungsi DPMD yang terkait dengan Visi, Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMD Provinsi

Mengemukakan faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan DPMD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Memuat faktor - faktor dari pelayanan DPMD yang mempengaruhi permasalahan DPMD.

BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD

Memuat tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi dasar penyusunan kinerja DPMD selama lima tahun

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini menjelaskan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja DPMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Pada Bagian ini mengemukakan kesimpulan dan saran atas penyusunan perubahan Renstra.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAMPANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah adanya otonomi daerah telah ditetapkan melalui Tugas, Fungsi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sampang.

a. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengedalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana dinas
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dinas
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudusial)
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*)
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat serta mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat.
- b. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat.
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat, dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna
- b. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dan usaha ekonomi, sarana prasarana dan teknologi tepat guna; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Bina Pemerintahan Desa dan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pemilihan serta pelantikan kepala desa dan aparat pemerintahan desa
- b. Penyusunan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan aset desa

- c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan aset desa
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan aset desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

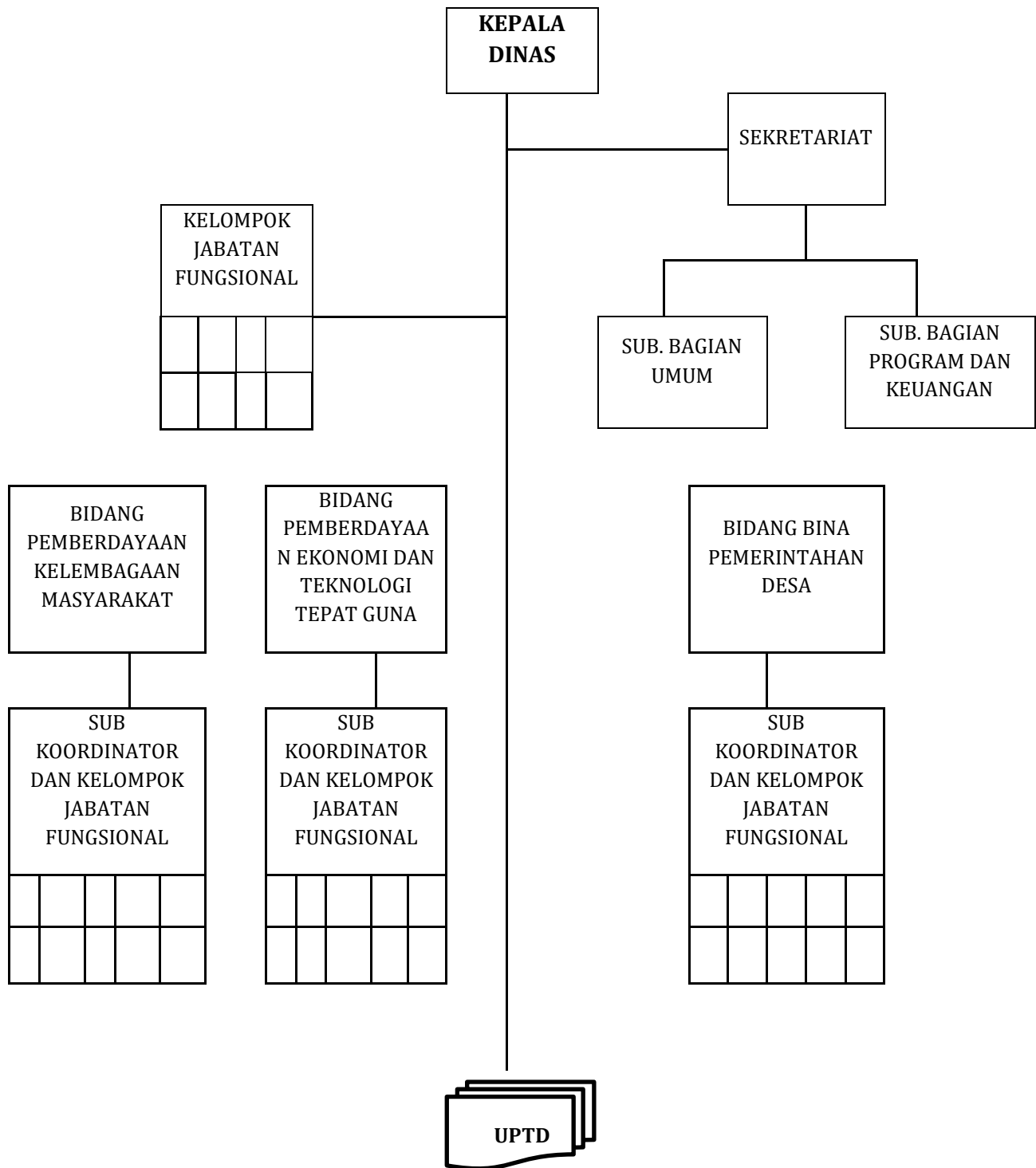
UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/keterampilannya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi Sekretariat, Bidang dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- c. Subkoordinator diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Pejabat yang Berwenang dan melaksanakan tugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- d. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.
- e. Pejabat fungsional mulai melaksanakan fungsi terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAMPANG



2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki personel sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga Orang). Uraian jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional yang terlibat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.1

**JUMLAH PNS DPMD KABUPATEN SAMPANG
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan IVc (Pembina Utama Muda)	1
2	Golongan IVb (Pembina Tk. I)	2
3	Golongan IVa (Pembina)	5
4	Golongan IIIId (Penata Tk. I)	6
5	Golongan IIIc (Penata)	1
6	Golongan IIIb (Penata Muda Tk.I)	7
7	Golongan IIIa (Penata Muda)	4
8	Golongan IIId (Pengatur Tk. I)	1
9	Golongan IIc (Pengatur)	3
10	Golongan IIb (Pengatur Muda Tk. I)	3
11	Golongan II (Pengatur Muda)	2
	JUMLAH PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN	35
	JUMLAH PEGAWAI NON PNS	10
	JUMLAH TOTAL PEGAWAI	43

Tabel 2.2

**JUMLAH PEGAWAI DPMD KABUPATEN SAMPANG
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN								JML
		SD	SLTP	SLTA	D-1	D-3	S-1	S-2	S-3	
1	Struktural									
	1 Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	2 Eselon III	-	-	-	-	-	3	2	-	5
	3 Eselon IV	-	-	0	-	-	1	1	-	2

2	Staf PNS	-	-	7	-	2	10	2	-	21
3	Staf Non PNS	-	-	1	-	1	5	-	-	7
4	Fungsional	-	-	-	-	-	8	-	-	8
	JUMLAH	-	-	10	-	3	20	9	-	43

Tabel 2.3
JUMLAH PEGAWAI DPMD KABUPATEN SAMPANG
BERDASARKAN GENDER

No	UNIT KERJA	GENDER						JML
		Laki-Laki			Perempuan			
1	Struktural							
	1 Eselon II	1			0			1
	2 Eselon III	4			1			5
	3 Eselon IV	1			1			2
2	Staf PNS	16			5			21
3	Staf Non PNS	4			4			8
4	Fungsional	5			2			7
	JUMLAH	25			13			43

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Tahun 2018 diperoleh dengan cara pembelian, transfer masuk, hibah dari SKPD lain maupun Pihak ke 3 yang diperoleh dari Tahun 1985 s/d Tahun 2020, tapi dari seluruh aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kondisinya tidak semua baik sebagian ada yang rusak ringan maupun berat

Tabel 2.3
ASET/MODAL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAMPANG

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kursi Lipat	Elephant	1985	Unit	7	4	0	3	4Di Ruang Kerja, 1 Ruang Ekonomi, 2 Ruang KD	Rp 1	3 buah proses mutasi
2	Kursi Ukir	-	1985	Unit	1	0	0	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	proses mutasi
3	Meja Kerja	-	1985	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
4	Rak Kayu	-	1985	Unit	2	0	2	0	Gudang	Rp 1	-
5	Kursi Putar	Indachit	1998	Unit	6	6	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
6	Kursi Rapat Plastik Putih	Foniture	1998	Buah	11	11	0	0	Aula Bapemas	Rp 1	-
7	Kursi Besi Warna Hijau	Chitose	1999	Unit	2	2	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Kursi Kaki Besi Warna Hitam	-	1999	Unit	3	3	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
9	Kursi Kayu Warna Merah	-	1999	Unit	2	2	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
10	Lemari kayu 2 Kaca	-	1999	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretaris	Rp 1	-
11	Kursi besi Warna Hitam Kecil		2000	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	proses mutasi
12	Kursi Busa Warna Biru	-	2000	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
13	Meja Tamu Kaca	-	2000		1	0	0	1	Ruang Sekretaris	Rp 1	-
14	Sofa Warna Hijau	-	2000	Unit	1	0	0	1	Ruang Sekretaris	Rp 1	proses mutasi
15	Kursi Tamu	-	2001	Unit	4	4	0	0	Ruang Tamu	Rp 1	-
16	Meja Tamu	-	2001		1	1	0	0	Ruang Tamu	Rp 1	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
17	Almari F.K	Brother	2002	Unit	2	2	0	0	1 Ada di ruang sekretariat, 1 Ada di Ruang Kerja tengah	Rp 1	-
18	Almari F.K (2 Pintu)	Brother	2002	Unit	2	2	0	0	1 Ada di Ruang KD, 1 Ada di Gudang	Rp 1	-
19	Filling Besi/Metal	Data Strip	2002	Unit	1	1	0	0	Gudang Bapemas	Rp 1.000.000	-
20	Kursi Putar	-	2002	Unit	2	0	0	2	Ruang Kerja Tengah	Rp 1.500.000	proses mutasi
21	Rak Besi/Metal	NCB7510	2002	Unit	1	1	0	0	Gudang Bapemas	Rp 200.000	-
22	Sepeda Motor	Honda MCB 97 Win	2002	Unit	1	1	0	0	Solihin	Rp 1	-
23	Sepeda Motor	Honda C100ML	2002	Unit	1	1	0	0	Muamar	Rp 1	-
24	Sepeda Motor	Honda C100ML	2002	Unit	1	1	0	0	Poernomo, SE	Rp 1	-
25	Almari F.K	Brother	2003	Unit	6	5	1	0	3 Ada di ruang Kerja tengah, 1 Ada di Ruang SDA dan TTTG, 2 Di gudang	Rp 1	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
26	Kursi Rapat Plastik Putih	Tenmi Furniture	2003	Unit	20	20	0	0	Aula Bapemas	Rp 1	-
27	Meja Kerja Warna Hitam	-	2003	Unit	3	3	0	0	1 Ada di ruang Sekretariat, 2 Ada di Ruang kerja	Rp 1	-
28	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Abdullah Ibnu Rasjid	Rp 1	-
29	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Mochamad Ali Yasak, S.sos	Rp 9.850.000	-
30	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Edy Firmansyah	Rp 9.850.000	-
31	Sepeda Motor	Suzuki FD 110X	2003	Unit	1	1	0	0	Sumiati	Rp 9.850.000	-
32	Sepeda Motor	Honda MCB 97 win	2003	Unit	1	1	0	0	Moh. Hairil Fadilah, SH	Rp 9.850.000	-
33	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Umami Salamah, S.Sos	Rp 1	-
34	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Jufri, S.Pd, MM	Rp 1	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			NILAI	KET	
						FISIK ADA					LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
35	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Slamet Ariyadi	Rp 9.850.000	-
36	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Agus Sapto Utomo	Rp 9.850.000	Proses penghapusan
37	Sepeda Motor	Honda MCB 97 win	2003	Unit	1	1	0	0	Budi Hartono	Rp 9.850.000	-
38	Sepeda Motor	Kawasaki (Blitz)	2003	Unit	1	1	0	0	Bachtiar Agung Kusumajaya, SE	Rp 9.850.000	-
39	Meja Komputer	-	2004	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
40	Mobil	Toyota Kijang KF 80	2004	METER	1	1	0	0	Pool / Operasional	Rp 1	-
41	Sepeda Motor	Honda MCB 97 Win	2004	Unit	1	1	0	0	Murdiono, SE,MM	Rp 1	-
42	Kursi Putar	-	2005		3	3	0	0	2 Ruang Kerja Tengah, 1 Ruang KD	Rp 1	-
43	Meja Kerja	-	2005	Unit	4	4	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
44	Kursi Putar Besar	Rakuda	2006	Buah	1	0	1	0	SDA	Rp 1	-
45	Kursi Putar Kecil	Rakuda	2006	Unit	1	0	0	1	Ruang Sekretariat	Rp 1	proses mutasi
46	Lemari arsip	-	2006	Unit	1	1	0	0	Gudang Bapemas	Rp 1.500.000	-
47	Meja Kerja	-	2006	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretaris	Rp 1	-
48	Meja Komputer	Kenko	2006	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
49	Meja Komputer	-	2006	Unit	2	2	0	0	1 Ruang Kerja Tengah, 1 Sekretariat	Rp 1	-
50	Mesin Ketik	Oliverti	2006		3	0	2	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	1 buah proses mutasi
51	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	Unit	1	1	0	0	Ahmad Taufikurrahman	Rp 10.198.500	-
52	Sound System	Thunder	2006	Unit	1	1	0	0	Aula Bapemas	Rp 4.350.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
53	Computer	HP	2007	Unit	1	0	0	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 7.500.000	proses mutasi
54	Komputer	LG	2007	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
55	Kursi Kerja Roda Putar	-	2007	Buah	2	1	1	0	1 Ruang Kerja Tengah, 1 Aula	Rp 1.900.000	-
56	Kursi Putar	-	2007	Unit	4	4	0	0	Ruang Sekretaris, Ruang SDA dan TTG, Ruang Ekonomi, Ruang Kepala	Rp 1	-
57	Laptop	Acer	2007	SET	1	1	0	0	Ruang Sekretariat	Rp 7.500.000	-
58	Meja Kerja	-	2007	Buah	1	1	0	0	Ruang Sekretariat	Rp 1	-
59	Meja Kerja Kantor	-	2007	Buah	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 800.000	-
60	Proyektor	-	2007	Unit	1	1	0	0	Aula DPMD	Rp 10.000.000	-
61	Komputer	LG	2008	Buah	2	2	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 15.000.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			NILAI	KET	
						FISIK ADA					LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
62	Kursi Kerja	-	2008	Unit	8	8	0	0	2 Ruang Sosbud, 1 Ruang Sekretariat, 1 Ruang Kerja Tengah, 4 Aula	Rp 2.650.000	-
63	Kursi Rapat Plastik Putih	Napollytop	2008	Unit	19	19	0	0	Aula DPMD	Rp 1	-
64	Lap.top	Toshiba	2008	Unit	1	1	0	0	Ruang Ekonomi	Rp 9.900.000	-
65	Meja Kerja	-	2008	Buah	3	3	0	0	1 Ruang Sekretariat, 2 Ruang Kerja Tengah	Rp 2.400.000	-
66	Sepeda Motor	Suzuki EN 125A	2008	Unit	1	1	0	0	Putut Tri Cahyoko, SE	Rp 14.850.000	-
67	A.C. Split	-	2009	Unit	3	2	1	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 14.250.000	-
68	Handycam	Sony	2009	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretariat	Rp 8.250.000	-
69	Jam Dinding	-	2009	Unit	2	2	0	0	Aula DPMD dan Ruang Kepala	Rp 300.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
70	Kamera digital	Nikon	2009		1	0	0	1	Ruang Sekretariat	Rp 3.500.000	proses mutasi
71	Computer	-	2009	Unit	2	2	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 15.800.000	-
72	kursi kerja	-	2009	Unit	3	3	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 2.700.000	-
73	Lap.top	Toshiba	2009	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretariat	Rp 12.000.000	-
74	meja kerja	-	2009	Unit	3	3	0	0	2 Ruang tengah Kerja, 1 Aula	Rp 2.550.000	-
75	meja rapat	-	2009	Unit	12	12	0	0	Aula	Rp 18.830.760	-
76	meja rapat	-	2009	Unit	1	1	0	0	Aula	Rp 1.569.240	-
77	Papan Kegiatan	-	2009	Buah	1	1	0	0	Aula	Rp 1	-
78	Printer	Epson	2009	Unit	2	0	0	2	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.000.000	proses mutasi

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
79	Printer	Epson	2009	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.800.000	-
80	Rak Kayu	-	2009	Unit	1	1	0	0	Ruang Kepala	Rp 4.000.000	-
81	Sofa	-	2009	Unit	1	1	0	0	Ruang Kepala	Rp 5.000.000	-
82	Televisi	-	2009	Unit	1	1	0	0	Ruang Tamu	Rp 1.500.000	-
83	AC UNIT	Sharp	2010	Unit	2	2	0	0	Aula	Rp 9.750.000	-
84	AC UNIT	Toshiba	2010	Unit	1	1	0	0	Aula	Rp 27.650.000	-
85	INTERNET	-	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1.000.000	-
86	KAMERA	-	2010	Unit	1	0	0	1	Ruang SDA dan TTG	Rp 3.000.000	proses mutasi
87	KAMERA	-	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang KD	Rp 3.320.000	-
88	KARPET	-	2010	Unit	40	40	0	0	Kantor DPMD	Rp 4.250.000	-
89	KARPET 5 METER	-	2010	Buah	5	5	0	0	Kantor DPMD	Rp 1.450.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
90	KOMPUTER 1 PAKET	-	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 7.500.000	-
91	KOMPUTER 1 UNIT	-	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 7.950.000	-
92	KORDEN	-	2010	Unit	75	75	0	0	Kantor DPMD	Rp 17.625.000	proses mutasi
93	KURSI RAPAT	-	2010	Unit	5	5	0	0	Ruang Kepala	Rp 4.875.000	-
94	Laptop	TOSHIBA	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang Pemberdayaan Ekonomi & TTG	Rp 10.000.000	-
95	Laptop	TOSHIBA	2010	Unit	2	2	0	0	Ruang Kelembagaan Desa	Rp 20.600.000	-
96	MEJA KERJA	-	2010	Unit	30	30	0	0	Ruang Kerja Ruang SDA dan TTG, Ruang Ekonomi, Ruang Sosbud, Ruang KD, Ruang Tamu	Rp 39.500.000	-
97	MEJA RAPAT	-	2010		1	1	0	0	Ruang Kepala	Rp 3.350.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
98	MESIN KETIK	OLIVERTI	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 2.750.000	-
99	MICROPHONE	-	2010	PAKET	3	3	0	0	Aula	Rp 5.400.000	-
100	Mobil	Isuzu TBR 54 FH Panther Touring	2010	Unit	1	1	0	0	Kantor DPMD	Rp 265.670.000	-
101	PARTISI	-	2010	Unit	140	140	0	0	Kantor DPMD	Rp 62.650.000	-
102	PRINTER	HP	2010	Unit	1	0	0	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.450.000	proses mutasi
103	PRINTER	Epson	2010	Unit	1	0	0	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 1.800.000	proses mutasi
104	PRINTER	Canon Pixma	2010	Unit	1	0	1	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1.828.000	
105	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	2010	Unit	1	1	0	0		Rp 14.331.000	-
106	SOUND SYSTEM	-	2010	Unit	1	1	0	0	Aula DPMD	Rp 10.200.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
107	TELEVISI	TOSHIBA REGZA	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang Kepala	Rp 4.950.000	-
108	UPS	-	2010		1	0	0	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 600.000	proses mutasi
109	WALLPAPER	-	2010		50	50	0	0	Kantor DPMD	Rp 4.140.000	-
110	AC UNIT	Panasonic	2011		2	2	0	0	Ruang Sekretaris dan Ruang Kepala	Rp 9.000.000	-
111	KURSI RAPAT	CHITOSE	2011	Buah	56	56	0	0	Aula DPMD	Rp 20.100.000	-
112	Laptop	ACER	2011	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretariat	Rp 10.000.000	-
113	Papan Informasi, Data, Struktur	-	2011	Buah	1	1	0	0	Ruang Tamu, Ruang Kepala, Ruang Sekretaris	Rp 4.000.000	-
114	Tandon Air	-	2011	Unit	1	1	0	0	Gudang DPMD	Rp 2.950.000	-
115	VACUM CLEANER	SANYO	2011		1	1	0	0	Ruang Tamu	Rp 3.025.000	-
116	AC UNIT	Toshiba	2012	Buah	1	0	1	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 4.750.000	proses mutasi

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
117	BRANKAS	-	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretariat	Rp 5.500.000	-
118	ETALASE	-	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Tamu	Rp 2.900.000	-
119	KARPET 4 METER X 4,6 METER	-	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 2.500.000	-
120	KELENGKAPAN KOMPUTER (MAINBOARD, HARDISK, POWER SUPPLY)	-	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 800.000	-
121	KIPAS ANGIN (BLOWER)	-	2012	Buah	3	3	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 900.000	-
122	KURSI HADAP PEJABAT ESELON III	-	2012	Unit	5	2	3	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 4.000.000	-
123	KURSI KERJA	-	2012		5	3	2	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 4.750.000	-
124	KURSI RAPAT	-	2012	METER	6	6	0	0	Ruang Kepala	Rp 4.500.000	-
125	Laptop	TOSHIBA	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 10.000.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
126	LEMARI FILING KABINET (KECIL)	DAINICHI	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1.850.000	-
127	LEMARI FILING KABINET BESAR	BROTHER	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 2.750.000	-
128	MEJA RAPAT	-	2012		1	1	0	0	Aula DPMD	Rp 3.500.000	-
129	MESIN HITUNG	-	2012		2	2	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 500.000	-
130	MIMBAR/PODIUM	-	2012	Buah	1	1	0	0	Aula	Rp 2.000.000	-
131	PAPAN/INFORMASI/DATA/BACA/NAMA	-	2012	Buah	4	4	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.000.000	-
132	PRINTER	EPSON	2012	Unit	1	0	0	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.500.000	-
133	TANGGA ALMINIUM	-	2012	Unit	1	1	0	0	Gudang	Rp 1.600.000	-
134	AC	TCL	2013		2	2	0	0	Aula	Rp 10.000.000	-
135	PENGADAAN KAMERA	SONY	2013	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.475.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
136	PENGADAAN KURSI KERJA LIPAT	CHITOSE	2013	Unit	14	14	0	0	Aula	Rp 6.230.000	-
137	PENGADAAN KURSI KERJA PUTAR	DAICHI	2013	Unit	10	10	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 9.400.000	-
138	PENGADAAN LAPTOP	ACER ASPIRE	2013	Unit	2	2	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 19.750.000	-
139	PENGADAAN MESIN FAXIMILI	-	2013	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.730.000	-
140	PENGADAAN SOFA	-	2013	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretaris	Rp 3.285.000	-
141	PENGADAAN TEMPAT SAMPAH	-	2013	Unit	1	1	0	0	Ruang Tamu	Rp 635.000	-
142	PENGADAAN WEBSITE	-	2013	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 19.800.000	-
143	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PENGADAAN SEPEDA MOTOR	-	2013	Unit	1	1	0	0	-	Rp 1.600.000	-
144	Sepeda Motor	Honda Supra 125	2013	Unit	1	1	0	0	Umi Salamah	Rp 16.000.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
145	Sepeda Motor	Honda Supra 125	2013	Unit	1	1	0	0	Kabid	Rp 16.000.000	-
146	AC	Honshu	2014	Unit	1	1	0	0	Aula DPMD	Rp 4.975.000	-
147	Komputer	LG	2014	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 4.950.000	-
148	Kursi Kerja	DAINICHI	2014	Unit	8	8	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 7.000.000	-
149	Kursi Rapat	CHITOSE	2014	Unit	20	20	0	0	Aula DPMD	Rp 7.000.000	-
150	Laptop	TOSHIBA	2014	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 9.975.000	-
151	Laptop	ACER	2014	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 9.850.000	-
152	Monitor/ Display	LG	2014	Buah	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1.450.000	-
153	Papan Informasi, Data, Nama, Baca	-	2014	Buah	1	1	0	0	Ruang Tamu	Rp 3.500.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
154	Printer	Canon Pixma	2014	Unit	3	3	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 4.500.000	-
155	Proyektor	PANASONIC	2014	Unit	1	1	0	0	Aula	Rp 7.425.000	-
156	AC	Panasonic	2015		1	1	0	0	Ruang kerja tengah	Rp 4.950.000	-
157	Filling Kabinet	Lion	2015		2	2	0	0	Ruang kerja kepala badan, Ruang kerja tengah	Rp 5.800.000	-
158	Laptop	ASUS	2015		2	2	0	0	Ruang kerja sekretariat	Rp 19.900.000	-
159	Lemari Arsip Sliding Kaca	Brother	2015		1	1	0	0	Ruang kerja ekonomi	Rp 2.850.000	-
160	Pengadaan printer	Canon	2015		3	3	0	0	Ruang kerja sekretariat, Ruang kerja SDA&TTG, Ruang kerja ekonomi	Rp 5.205.000	-
161	Sound System Set	-	2015		1	1	0	0	Ruang Aula	Rp 9.875.000	-
162	Kursi Kerja Pejabat	Manager Daichi Oscar Hitam	2015	Buah	6	6	0	0	Manager Daichi Oscar Hitam	Rp 5.925.000	

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK				NILAI	KET
						FISIK ADA			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹		
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
163	Lemari Buku	-	2015	Buah	1	1	0	0	-	Rp 2.600.000	
164	Gordyne	-	2015	Unit	1	1	0	0	-	Rp 19.125.000	
165	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Vario 110 Iss Advance	2015	Unit	2	1	0	0	Vario 110 Iss Advance	Rp 31.409.000	
166	Lemari Arsip pejabat VIP	-	2016	Unit	1	1	0	0	Ruang tengah	Rp 1.420.000	
167	Printer	CANON	2016	Unit	3	3	0	0	Sekretariat	Rp 5.400.000	
168	CPU	Dasumba	2016	Unit	1	1	0	0	Sekretariat	Rp 2.600.000	
169	Notebook	Asus	2016	Unit	1	1	0	0	Sekretariat	Rp 9.875.000	
170	Handycam	SONY	2016	Unit	1	1	0	0	Sekretariat	Rp 5.425.000	
171	CAMERA DIGITAL	SONY	2016	Unit	1	1	0	0	Sekretariat	Rp 4.375.000	

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) ¹	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
172	kursi Kerja Pejabat	Daichi	2016	Unit	2	2	0	0	Sekretaris	Rp 4.000.000	
173	Sofa	-	2016	Unit	1	1	0	0	Ruang Kepala	Rp 5.000.000	
174	Karpet	-	2016	Unit	1	1	0	0	Ruang Kepala	Rp 2.945.000	
175	AC power standing	Daikin	2016	Unit	1	1	0	0	Ruang Aula	Rp 21.000.000	
										Rp 1.255.271.560	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMPANG

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TAR GET SPM	TAR GET IKK	TARGET INDIKA TOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -						RASIO CAPAIAN TAHUN KE -					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	23
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																					
	Meningkatnya Keswadayaan dan kemandirian Masyarakat Desa	-	-	Persentase Desa Kategori Berkembang, Maju/Mandiri	51,67	57,78	100	100	100	100	90,55	100	100	100	100	100	123	173	100	100	100	100
				Persentase Desa Kategori Maju				16,67	19,44	22,22				16,67	19,44	22,22				100	100	100
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa			Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	66,67	77,70	100	100	100	100	66,67	77,70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu				79,82	96,30	100				79,82	97,30	100				100	100	100

Dari Tabel diatas Indikator yang mencapai target adalah :

a. Meningkatkan Keswadayaan dan Kemandirian Masyarakat Desa

Upaya meningkatkan keswadayaan dan Kemandirian Masyarakat Desa dari tahun ke tahun melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat terus bertumbuh.

b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Dalam upaya meningkatkan tata kelola desa, pemerintahan desa terus membenahi laporan dokumen perencanaan dan penganggaran secara benar dan tepat waktu. Upaya tersebut juga mengalami peningkatan. Ini bisa dilihat dari persentase desa yang maksimal. Namun perlu perhatian lebih lanjut agar penambahan pengelolaan anggaran desa dapat terus optimal dan akuntabel.

Tabel 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ang-garan	Rea-lisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.008.838.200	3.228.849.000					2.712.322.233	2.621.663.427					90,15	81,19					0,07	-0,03
BELANJA LANGSUNG	8.164.367.900	4.250.404.457					7.917.841.986	3.916.221.383					96,98	92,14					-0,48	-0,51
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Jasa Perkantoran	356.932.000	386.171.188					350.646.631	370.122.956					98,24	95,84					0,08	0,06
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	292.666.400	313.703.250					288.284.850	312.540.775					98,50	99,63					0,07	0,08
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.300.000	21.089.000					16.324.350	21.089.000					84,58	100,00					0,09	0,29
4 Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	44.680.000	11.143.000					44.072.500	11.074.160					98,64	99,38					-0,75	-0,75
5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan	2.129.849.500	1.500.944.275					2.107.828.281	1.478.001.036					98,97	98,47					-0,30	-0,30
6 Program Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	3.387.570.000	345.118.015					3.260.389.625	313.146.390					96,25	90,74					-0,90	-0,90
7 Program Bina Pemerintahan Desa	1.933.370.000	1.672.235.729					1.850.295.749	1.410.247.066					95,70	84,33					-0,14	-0,24
BELANJA DAERAH			4.388.027.214	8.510.496.789	9.761.352.201	11.148.835.186			4.258.237.513	8.534.898.103	9.995.250.323	11.148.835.186			97,04	100,29	102,40	100,00	0,41	0,43
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.071.657.643	4.022.246.227	4.519.928.690	5.324.385.389			3.853.367.336	4.022.246.227	4.519.928.690	5.324.385.389			94,64	100,00	100,00	100,00	0,10	0,12
2 Program Penataan Desa			426.999.095	411.316.842	177.418.720	204.031.518			421.782.294	435.718.156	411.316.842	204.031.518			98,78	105,93	231,83	100,00	-0,15	-0,18
3 Program Peningkatan Kerjasama Desa			0	142.167.100	43.380.277	52.056.333			0	142.167.100	43.380.277	52.056.333			0,00	100,00	100,00	100,00	0	0
4 Program Administrasi Pemerintahan Desa			3.110.286.861	2.532.625.668	3.386.772.628	3.689.432.318			3.051.458.864	2.532.625.668	3.386.772.628	3.689.432.318			98,11	100,00	100,00	100,00	0,08	0,09
5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat			850.741.258	1.402.140.952	1.633.851.886	1.878.929.628			784.996.355	1.402.140.952	1.633.851.886	1.878.929.628			92,27	100,00	100,00	100,00	0,32	0,37

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

Capaian Kinerja dan realisasi anggaran program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rata – rata mencapai target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 90% meski mengalami refocusing.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan semakin kompleksnya permasalahan masyarakat, terutama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kemajuan dan kemandirian desa diperlukan langkah tindak lanjut dengan program kegiatan yang bersifat partisipatoris. Berkenaan dengan hal tersebut saat ini pemerintah tengah berupaya memenuhi target pembangunan sebagaimana disepakati dalam “Millennium Goals” atau “Millennium Development Goals” (MDG). Millenium Development Goals (MDG) adalah sebuah paket target pembangunan yang menjadi tujuan bersama seluruh anggota UN untuk menjadikan dunia ini lebih baik bagi semua orang. MDG tersebut merupakan hasil kesepakatan antar kepala negara anggota UN di dalam forum WSSD (World Summit for Sustainable Development) di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tahun 2002. Perumusan MDG merupakan tindak-lanjut dari UN Millenium Declaration yang dihasilkan pada World Summit di New York pada tahun 2000. dan Indonesia adalah salah satu Negara yang terlibat di dalamnya. Tujuan-tujuan pembangunan di dalam MDG tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) tujuan besar (*goals*), yaitu: (1) Menghilangkan kemiskinan ekstrim dan kelaparan. (2) Mencapai pendidikan dasar secara universal. (3) Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. (4) Menurunkan kematian bayi. (5) Meningkatkan kesehatan ibu. (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit yang lain. (7) Menjamin keberlanjutan lingkungan. (8) Menjalin kerjasama global untuk pembangunan. Kedelapan tujuan besar itu kemudian dikelompokkan dalam tiga arah kebijakan fiskal yakni; program *Pro Poor*, *Pro Job*, *Pro Growth*, dan *Pro Environment*.

Terkait dengan hal tersebut diatas, jika dirinci berdasarkan target MDGs itulah, maka Sesuai dengan arah kebijakan fiskal 2011, yaitu Pro-Growth, Pro job, Pro-Poor dan Pro Environment maka program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang perlu ditingkatkan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

Pada *Program Proo Poor* (indicator kinerja program yang berpihak pada masyarakat miskin) kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri meliputi:

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
2. Program Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna
3. Program Bina Pemerintahan Desa

Pada *Program Pro Growth* (kegiatan dengan indicator berpihak pada pertumbuhan ekonomi) meliputi:

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
2. Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat
3. Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi
4. Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Desa
5. Pengembangan Teknologi Tepat Guna
6. Peningkatan Perencanaan, Pengelolaan keuangan dan Pembangunan Desa
7. Monitoring Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Tabel 2.4

**KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA DPMD KABUPATEN SAMPANG
TERHADAP SASARAN RENSTRA SKPD PROVINSI DAN RENSTRA K/L**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPD KABUPATEN / KOTA	SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA K/L
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan		
	Persentase Desa Kategori Berkembang, Maju/Mandiri			Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam Pembangunan
	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu			Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa

2.4.1 Hasil Telaahan terhadap RTRW

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan rencana pengelolaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTWR propinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai peraturan pemerintah tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan DPMD berada dalam Program Penataan Desa dan Program Peningkatan kerja Sama dengan lokus mendorong pusat untuk meningkatkan pengembangan ekonomi terutama dalam pengembangan kerjasama kawasan dan peningkatan fungsi pasar desa sebagai pusat perbelanjaan.

2.4.2. Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan pegangan utama dalam merumuskan setiap strategi pembangunan berikut monitoring dan evaluasinya, baik dalam konteks kiwilayahan maupun sektoral. Hal itu untuk menjamin agar tidak terjadi efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Karena itu perlu dipertimbangkan secara Inheren dalam kebijakan, rencana, dan program.

Adapun peran KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah sebagai Instrument metodologis pelengkap (Komplementer) atau tambahan (Subplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Berdasarkan substansi RTRW di atas, maka perlu mengoptimalkan fungsi lingkungan hidup dengan baik, terutama menjaga kualitas sumber daya air, tanah, dan udara. Juga mewujudkan pemberdayaan di bidang lingkungan hidup mengenai pentingnya memelihara SDA dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya Indeks Desa Mandiri	Belum terkelolanya potensi desa secara optimal sehingga tidak ada desa mandiri	<p>Faktor Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam hal peningkatan kemandirian desa masih belum optimal • Keterbatasan SDM dalam mengelola desa • Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung <p>Faktor Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kemampuan masyarakat Desa dalam mengelola potensi desa. - Pemahaman aparaturnya desa akan pentingnya desa mandiri masih rendah
2.	Minimnya Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berkembang (57,78%)	Tidak semua BUMDes yang ada di Desa adalah BUMDes dalam kategori berkembang.	<p>Faktor Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam hal pengelolaan badan ekonomi desa masih belum optimal • Keterbatasan SDM pada DPMD dalam melaksanakan fungsi pelayanan • Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan <p>Faktor Eksternal:</p> <p>Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya BUMDesa masih rendah.</p>
3.	Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik perlu ditingkatkan	Tingkat kesadaran aparaturnya desa dalam tata kelola pemerintahan desan masih belum optimal	<p>Faktor Internal:</p> <p>Sosialisasi tentang pengelolaan desa dan produk hukum desa belum optimal</p> <p>Faktor Eksternal:</p> <p>Minimnya pengetahuan aparaturnya desa dalam tata kelola pemerintahan desa</p>

Sumber : DPMD Kab. Sampang, 2022

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

a. Visi Kabupaten Sampang

Visi Kabupaten Sampang periode Tahun 2019-2024 adalah **“Sampang Hebat Bermartabat”**

b. Misi Kabupaten Sampang :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- b. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif
- c. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
- d. Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
- e. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu

Sinkronisasi visi dan misi Kabupaten Sampang dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang terletak pada misi kedua, yaitu; **“Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”** dan misi keempat, yaitu : **“Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**

Tabel 3.2
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KABUPATEN SAMPANG

<i>Visi : Mewujudkan Sistem Birokrasi yang Sehat, Masyarakat Yang Kuat, Lingkungan Yang Bersahabat, Demi Terciptanya Kabupaten Sampang Yang Bermartabat</i>				
NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
	MISI 2: “Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”	Cakupan atau jangkauan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat masih sangat terbatas terhadap pengembangan desa mandiri, pengembangan agribisnis, dan pengelolaan BUMDes untuk mengembangkan ekonomi kreatif	Program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi ada yang masih tumpang tindih, umumnya menerima tambahan bantuan melalui program lainnya	Adanya potensi dan sumber untuk menuju desa mandiri dan peningkatan ekonomi desa yang dilakukan oleh komunitas / masyarakat, seperti Pokmas, Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), BUMDes,
1	MISI 4 : “Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”	Sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa sangat terbatas terhadap perkembangan desa mandiri di perdesaan	Program tata kelola pemerintahan desa belum optimal karena keterbatasan dana	Adanya potensi dan sumber dana berupa DD/ADD mengatasi permasalahan minimnya kapabilitas sumber daya manusia di perdesaan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
	(1) Program peningkatan kerjasama antar desa (2) Program penataan desa (3) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat (4) Program peningkatan administrasi pemerintahan desa			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Sampang Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri RI dan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri 2020-2024	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMD Prov. Jatim 2019-2024	Permasalahan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menurunnya jumlah Desa tertinggal dan meningkatnya jumlah Desa Mandiri	(1) Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan (2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan desa/kelurahan (3) Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	1. Indeks Desa Mandiri masih rendah 2. Minimnya desa yang memiliki BUMDesa Berkembang 3. Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik perlu ditingkatkan	1. Koordinasi dalam hal pelayanan masih belum optimal 2. Keterbatasan SDM pada DPMD dalam melaksanakan fungsi pelayanan 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan	1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-Undang, peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan DPMD secara ideal 2. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan desa mandiri 3. Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan sebagai basis pelayanan 4. Potensi desa yang melimpah

Sumber : DPMD Kabupaten Sampang, 2022

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis Dispendukcapil Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya indeks desa mandiri
- b. Minimnya desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berkembang
- c. Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik perlu ditingkatkan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, visi Kabupaten Sampang untuk tahun 2019-2024 adalah **“Sampang Hebat Bermartabat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat dua misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang dapat didukung dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Misi 2: **“Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif ”** serta Misi 4, yaitu: **“Memperkuat Tata kelola Pemerintahan dan Desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**

Ada pun untuk memenuhi kedua misi tersebut pemerintah Kabupaten Sampang di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1) TUJUAN

- **Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa**
- **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**

2) SASARAN

Sasaran (*objective*) dalam pembangunan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek maupun menengah, biasanya satu tahun atau lima tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan jabaran dari tujuan yang dapat terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama jangka menengah lima tahun harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. **Meningkatnya Keswadayaan dan Kemajuan Desa**
- b. **Meningkatnya Tata Kelola administrasi, keuangan, dan aset Desa**

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Kondisi Akhir Kinerja Sasaran Renstra
						Realisasi		Target				
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	0	0	0	0	1,67	3,33	5,0	5,0
				Persentase Desa Kategori Maju	13,89	8,80	10,00	13,89	16,67	19,44	22,22	22.22
2	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya Tata Kelola administrasi , keuangan dan aset desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu	n/a	41,85	57,41	62,96	79,81	96,29	100	100

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemajuan Desa	Persentase Desa kategori Mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri} \times 100\%}{\text{Jumlah Desa}}$	SK Mendagri	DPMD
		Persentase Desa Kategori Maju	$\frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	SK Mendagri	
2	Meningkatnya Tata Kelola administrasi , keuangan dan aset desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu	$\frac{\text{Persentasi Desa dengan dokumen perencanaan} + \text{persentase desa dengan pelaporan administrasi yang baik} + \text{Persentase desa dengan tata kelola aset yang baik}}{3}$	Data Simanis, Sipades, dan Sakera Mesem	DPMD

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang mendukung pada dua misi, yaitu; misi 2 dan misi 4. Pada **misi 2** mendukung pencapaian sasaran "**Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa**". Sedangkan pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran "**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa**".

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif						
T.2	Meningkatkan Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	IT.3				
S.13	Meningkatnya Kemajuan dan kemandirian desa	IS.12	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatkan Pembangunan Desa melalui pembangunan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi desa	Pembinaan, Pelatihan keterampilan, dan meningkatkan Partisipasi masyarakat serta menguatkan kelembagaan baik; lembaga kemasyarakatan maupun lembaga ekonomi BUMDes.	

Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.7	Indeks Reformasi Birokrasi			
S.18	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan Desa	IS.27	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan masyarakat	Pelatihan perencanaan dan penggarahan keuangan (DD/ADD) agar transparan dan akuntabel	DPMD

Selanjutnya adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal- hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan DPMD Kabupaten Sampang, dua factor tersebut adalah factor lingkungan internal dan factor lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2

**PENENTUAN ALTERNATIF STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN :
KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PROGRAM
PEMBERDAYAAN**

Faktor Eksternal	Peluang :	Tantangan:
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perhatian yang serius dari Pemerintah maupun Lembaga Sosial dalam upaya pengembangan lembaga ekonomi desa 2. Adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pengembangan lembaga 3. Terbukanya kerjasama dengan lembaga non pemerintah dalam pengembangan lembaga masyarakat dan lembaga ekonomi desa 4. Adanya Peran kemitraan antar stakeholders pembangunan untuk melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 5. Adanya Kerjasama Antar Daerah melalui Bakorwil IV Pamekasan dalam upaya pemberdayaan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Desa Mandiri di Kabupaten Sampang 2. Masih rendahnya Badan Usaha Milik Desa yang berkembang 3. Tingkat pengetahuan teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah; 4. Peran kemitraan antar stakeholder dalam upaya pemberdayaan masyarakat masih lemah 5. Masih tingginya ego sektoral antar SKPD yang menghambat kemitraan pemberdayaan masyarakat

Tabel 5.3
PENENTUAN STRATEGI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
Pencapaian Indikator Sasaran: Persentase Desa Kategori Mandiri & Maju			
1.	Meningkatkan Keswadayaan dan kemajuan desa	Prosentase desa kategori Mandiri dan maju	Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa
			Meningkatkan peran serta kelompok perempuan di perdesaan dalam pelaksanaan pembangunan
			Mengembangkan potensi lembaga adat
			Meningkatkan kualitas kader pemberdayaan masyarakat (KPM) dalam memajukan desa
			Meningkatnya kemampuan desa dalam membentuk BUMDesa dan pengelolaan BUMDesa serta pembentukan BUMDesa Bersama
Pencapaian Indikator Sasaran: Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran, administrasi, dan pelaporan aset yang benar dan tepat waktu			
2.	Meningkatnya Tata Kelola administrasi dan aset Desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu	Meningkatnya kemampuan aparatur desa agar lebih kompeten dalam pengelolaan pemerintahan desa dan administrasi desa
			Meningkatkan penatakelolaan aset desa
			Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam memanagerial keuangan dan pembangunan kawasan
			Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyusun dan mengelola APBDes

Tabel 5.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : Menuju Sampang Hebat Bermartabat			
MISI 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif			
MISI 4 : Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1) Meningkatkan Kemajuan dan kemandirian desa (2) meningkatna tata kelola pemerintahan desa	(1) Meningkatnya keswadayaan dan kemajuan desa (2) Meningkatnya tata kelola administrasi dan aset desa	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 2. pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat. 3. Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 4. Pengembangan lembaga desa dan lembaga ekonomi desa	1. Pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada golongan masyarakat miskin ekonomi lemah. 2. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dalam upaya memperkuat institusi pemerintah kabupaten. 3. Pemberdayaan masyarakat diarah kepada partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan 4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan desa mandiri dan berdaya

Beberapa inovasi DPMD Kabupaten Sampang sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya sasaran Renstra DPMD Kabupaten Sampang antara lain:

NO	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1	PUSAKA BUMDES (Pusat Studi dan Konsultasi Pengembangan) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan program pelayanan konsultasi dan inovasi pengembangan BUMDesa Tujuan : untuk mempercepat peningkatan tata kelola inovasi ekonomi BUMDesa
2	SIMANIS (Sistem Administrasi Desa berbasis aplikasi)	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan program pelayanan administrasi desa berbasis aplikasi untuk mempermudah aparatur desa dalam mengelola administrasi umum di desa Tujuan : Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi desa serta menghilangkan persepsi pengurusan dokumen sulit, ribet, dan lama.
3	SIPADES (Sistem aplikasi aset desa)	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan sistem aplikasi untuk tata kelola dokumentasi aset desa.
4	SI GONDONG (Sistem Informasi Gotong Royong)	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan sistem aplikasi untuk mengontrol kegiatan bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Tujuannya untuk optimalisasi kegiatan keswadayaan masyarakat desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan keterbatasan yang dimiliki, baik personel (Sumber Daya Manusia) maupun dana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya guna mendukung keberhasilan pembangunan terutama dalam penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kemandirian masyarakat, memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa melalui pendekatan (paradigma) pemberdayaan menuju Sampang Hebat bermartabat.

Untuk itu sebagaimana diamanatkan dalam tujuan renstra (rencana strategis), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang bahwa segala aspek RPJMD yang sesuai dengan kewenangan DPMD, kemudian DPMD menjabarkannya ke dalam program dan kegiatan kerja (sesuai dengan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

6.1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang terdiri dari 5 Program, 10 Kegiatan, dan 35 subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
6. Evaluasi kinerja perangkat daerah

c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan administrasi tugas ASN

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. Fasilitasi kunjungan tamu
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah

1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

II. Program Penataan Desa

a. Penyelenggaraan Penataan Desa

1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

III. Program Peningkatan Kerjasama Desa

a. Fasilitasi Kerjasama Desa

1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa
6. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
7. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
8. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
9. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
10. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

V. Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan, dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Pelayanan Informasi Publik.
3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHU N AWA L (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kiner ja	Rp.		
							Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Ki ne rja	Rp.	Ki ne rja	Rp.	Kiner ja	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM KEGIATAN RENSTRA LAMA (DI ISI REALISASI 2018-2020)																						
		2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	350,646,631	100	1,196,040,452									100	1,196,040,452	DPMD	Kab. Sampang
		2.07.01.01.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah Surat Terkirim		1010	1015	131,088,049	3.690	567,143,474									3.690	567,143,474		
				Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	bln	12	12		24										24			
				Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Memperoleh Jasa Perizinan	unit	24	26		46										46			
				Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Kebersihan	%		100		8										8			
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis		22	24		26										26			
				Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan	bln	12	12		12										12			
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	bln	12	12		12										12			
				Jumlah alat kebersihan yang disediakan	jenis	16	15		15										15			

		2.07.01.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	dok	4	4	14,657,500	10	24,702,100							10	24,702,100		
		2.07.01.04.03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	keg	2	2	15,000,000	2	14,999,150							2	14,999,150		
[MISI 2] Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Desa					Indeks	0.581	0.648		0.662										DPMD	Kabupaten Sampang
	Meningkatkan Keswadayaan dan Kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri																		
					%	51,67	90,40		100											
[MISI 4] Meningkatkan Tata kelola pemerintahan Desa					%	69,44	72,22		77,77										DPMD	Kabupaten Sampang
	Meningkatnya Tata Kelola administrasi dan aset Desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran yang benar dan tepat waktu																		
					%	100	100		100											
		Persentase Desa dengan tata kelola aset yang akuntabel																		
					%	38,89	44,44		55,55											
		2.07.01.15	Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LK) desa yang aktif	%	100	100	2,107,828,281	100	1,478,001,036							100	1,478,001,036		
		2.07.01.15.01	Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan	Jumlah kader PKK dan kelompok pokjanal Posyandu yang dibina	Ds&Kel		186	816,292,904	186	704,335,311							186	704,335,311		
		2.07.01.15.02	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Tradisi Masyarakat	Jumlah RKK (Kelompok Rukun Kematian Kampung) yang mendapat pembinaan	Klp		18	551,171,007	32	544,086,775							32	544,086,775		
				Jumlah kelompok gotong royong yang dibentuk dan rangkaian kegiatan BBGRM yang dilaksanakan	keg	1	4		0								0			
		2.07.01.15.03	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Masyarakat	Jumlah KPM yang dilatih	Org	186	186	740,364,370	186	229,578,950							186	229,578,950		
				Jumlah LPMD/K (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan) yang mendapatkan pelatihan	Klp	186	186		186								186			
		2.07.01.16	Program Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	Prosentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang	%	30	40	3,260,389,625	42,22	313,146,390							42,22	313,146,390		

		2.07.01.17.03	Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Aset Desa	01. Jumlah aparatur desa yang mendapatkan bimtek pengelolaan aset desa	Org	126	126	578,978,736	180	234,178,077							180	234,178,077		
				02. jumlah aparatur desa yang mendapatkan bimtek pengadministrasian	Org	126	126		180								180			
				03. jumlah aset desa yang dikelola desa	Brg	0	540		540								540			
				04. Jumlah Desa Pemenang lomba desa dan desa mandiri yang dibentuk	Ds	1	1		0								0			
		2.07.01.17.04	Monitoring Pelaksanaan Pemerintahan Desa	01. jumlah monitoring pada desa yang usai melaksanakan pilkades 2019	Ds	0	45	377,610,675		407,679,048								407,679,048		
				02. Jumlah Desa yang melaksanakan Inventarisasi Data Perangkat Desa yang membayar premi asuransi kesehatan BPJS	Ds	0	-		180								180			
				03. jumlah desa yang melaksanakan pengisian anggota BPD/ PAW BPD	Ds	0	-		5								5			
				04. Jumlah Kepala Desa Pemilihan Serentak yang dilantik	Org	0	-		38								38			
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA PERUBAHAN (DI ISI TARGET 2021-2024)																				
[MISI 2] Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Desa																				
					Indeks						0.682		0.702		0.722		0.74		0.74	DPMD Kabupaten Sampang
	Meningkatkan Keswadayaan dan Kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Maju									13,89		16,67		19,44		22,22		22,22	
		Persentase Desa kategori Mandiri									0		1,66		3,33		5		5	

[MISI 4] Meningkatkan Tata kelola pemerintahan Desa											83,33		88,89		94,44		100		100		DPMD	Kabupaten Sampang
	Meningkatnya Tata Kelola administrasi dan aset Desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi, dan aset yang benar dan tepat waktu			%	-	-	-	-	-												
					%	-	-	-	-	-	62,96		79,81		96,29		100		100			
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%						100	15,549,195	100	23,181,215	100	27,817,458	100	31,990,700	100	31,990,700		
		2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra dan Renja) Perangkat Daerah yang disusun	dok						6	6,105,495	6	3,623,490	6	4,348,188	8	5,000,540	8	5,000,540		
		2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dok						14	445,260	14	3,623,490	15	4,348,188	16	5,000,540	16	5,000,540		
		2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun	dok						6	653,985	6	3,623,490	6	4,348,188	8	5,000,540	8	5,000,540		
		2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	dok						14	653,985	14	3,623,490	15	4,348,188	15	5,000,540	15	5,000,540		
		2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang disusun	dok						6	653,985	6	3,623,490	8	4,348,188	8	5,000,540	8	5,000,540		
		2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, SAKIP LKJIP Perangkat Daerah yang disusun	dok						6	7,036,485	6	5,063,765	8	6,076,518	8	6,988,000	8	6,988,000		
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%						100	2,975,956,411	100	3,022,753,518	100	3,334,536,472	100	4,033,683,680	100	4,033,683,680		
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur yang menerima gaji dan tunjangan	bln						12	2,965,291,585	12	3,014,641,170	12	3,316,105,278	12	4,012,487,400	12	4,012,487,400		
		2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pemenuhan Alat tulis kantor	brg						4	8,704,331	4	8,112,348	5	9,734,818	8	11,195,200	8	11,195,200		
		2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	dok						0	0	0	0	6	4,348,188	6	5,000,540	6	5,000,540		
		2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang di susun	dok						8	1,960,495	0	0	9	4,348,188	9	5,000,540	9	5,000,540		
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%						10	523,084,742	0	499,999,847	100	519,999,847	100	529,999,847	100	1,029,999,694		
		2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	org						0	0	0	0	2	20,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000		

		2.13.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%						100	523,084,742	100	499,999,847	100	499,999,847	100	499,999,847	100	499,999,847
				Jumlah sosialisasi ketentuan di bidang Cukai yang dilaksanakan																
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%						100	80,892,164	100	89,184,331	100	129,726,773	100	149,185,797	100	149,185,797
		2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan							9	6,209,861	5	3,675,017	6	4,226,273	6	4,860,222	6	4,860,222
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan							14	10,569,406		9,347,314	14	10,752,500	15	12,365,375	15	12,365,375
		2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan							9	5,432,897		5,670,000	9	6,818,000	9	7,840,700	9	7,840,700
		2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan							8	3,520,000		0	8	3,600,000	9	4,140,000	9	4,140,000
		2.13.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	keg						89	3,560,000		5,400,000	100	6,210,000	100	7,141,500	100	7,141,500
		2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kegiatan rapat dan konsultasi dalam daerah							21	51,600,000	25	65,092,000	35	98,120,000	45	112,838,000	45	112,838,000
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%						100	104,111,296	100	26,876,616	100	30,908,300	100	35,544,545	100	35,544,545
		2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit						13	104,111,296	5	26,876,616	6	30,908,300	6	35,544,545	6	35,544,545
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%						100	213,863,835	100	170,500,700	100	209,599,840	100	241,039,820	100	241,039,820
		2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim dalam 1 tahun							500	3,610,000		0	550	4,999,000	600	5,748,850	600	5,748,850
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet	bln						12	57,253,835	12	57,500,700	12	69,000,840	12	79,350,970	12	79,350,970
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan keamanan gedung kantor	org						4	153,000,000	4	113,000,000	4	135,600,000	4	155,940,000	4	155,940,000
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%						100	158,200,000	100	169,750,000	100	237,340,000	100	272,941,000	100	272,941,000
		2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa service kendaraan dinas/operasional kantor							1	153,100,000	1	163,100,000	1	179,410,000	1	206,321,500	1	206,321,500

				Jumlah perpanjangan STNK roda 2 dan roda 4																		
		2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor						13	5,100,000	13	6,650,000	13	7,980,000	13	9,177,000	13	9,177,000			
		2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-						0		0	0	1	49,950,000	1	57,442,500	1	57,442,500			
		2.13.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran						0		0	0	100	20,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000			
		2.13.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-						0		0	0	2	20,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000			
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditata baik	%					54,44	426,999,095	57,78	154,277,140	61,67	177,418,720	67,78	204,031,518	67,78	204,031,518			
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa dengan sarana dan prasana BUMDes/BUMDesma yang ditata baik	%						426,999,095	100	154,277,140	100	177,418,720		204,031,518		204,031,518			
		2.13.02.1.01.04	Fasilitas Sarana dan Prasarana pelayanan pemerintahan Desa	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa	unit					3	426,999,095		154,277,140		177,418,720	0	204,031,518	0	204,031,518			
				Jumlah Bimtek Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air	keg					1		1		1		2		2				
				Jumlah Kegiatan Sarana Kegiatan TMMD	keg					1						0		0				
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase BKAD yang aktif	%					40		60	37,721,963	80	43,380,277	100	52,056,333	100	52,056,333			
				Jumlah Bumdesma yang terbentuk	unit					2		3		4		5		5				
		2.13.03.2.01	(2.13.03.2.01) Fasilitas Kerjasama antar desa	Persentase BUMDes Bersama yang aktif	%					100	0	100	37,721,963	100	43,380,277	100	52,056,333	100	52,056,333			
		2.13.03.2.02.01	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pembangunan kawasan perdesaan	Dokumen					0		1	37,721,963	1	43,380,277	1	52,056,333	1	52,056,333			
				Jumlah Pembinaan dan Monitoring BUMDES bersama yang dilaksanakan	keg					0		1		1		1		1				
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	%						3,110,286,861	100	2,532,625,668	100	3,386,772,628	100	3,689,432,318	100	3,689,432,318			
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan tata administrasi desa yang baik dan tepat waktu							3,110,286,861	100	2,532,625,668	100	3,386,772,628	100	3,689,432,318	100	3,689,432,318			
		2.13.04.2.01.01	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan	Dokumen					2	193,034,260	0	0	180	193,034,260	180	212,337,686	180	212,337,686			

			Pelakunya Hukum Adat yang sama Berada di lintas daerah kabupaten/kota	peningkatan kelembagaan																		
		2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan, dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) lembaga adat Desa/Kelurahan	dokumen						5	75,000,389	4	34,065,528	4	40,878,636	4	47,010,431	4	47,010,431		
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Lembaga						186	193,882,490	130	137,000,243	130	164,400,292	130	189,060,335	130	189,060,335		
				Jumlah rakor forum KPM Kabupaten yang dilaksanakan	Kec						14		14		14		14		14			
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Dokumen						2	119,598,721	180	83,998,957	180	100,798,750	180	115,918,560	180	115,918,560		
				Jumlah Calon Pengurus BUMDES yang mendapatkan pelatihan	Ds						180		180		180		180		180			
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)	laporan						1	64,014,024	1	69,999,845	1	83,999,850	1	96,599,790	1	96,599,790		
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	laporan						1	54,428,792	1	102,726,982	1	123,272,378	1	141,763,235	1	141,763,235		
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Ds						186	576,609,780	186	974,349,548	186	1,120,501,980	186	1,288,577,277	186	1,288,577,277		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan alat ukur yang jelas guna menilai keberhasilan sebuah organisasi. Karena itu diperlukan indikator kinerja dalam SKPD guna menunjang keberhasilan pembangunan yang tertuang dalam sasaran RPJMD. Berkenaan dengan itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan indikator kinerja selama lima tahun. Indikator tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan.

7.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun dalam menunjang sasaran RPMD adalah sebagai berikut :

1. **Indek Desa Membangun (IDM)**

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat tersebut dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

2. **Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik**

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Formulasi persentase desa dengan tata kelola desa yang baik di DPMD terdiri dari dua hal, yaitu; (1) Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran yang benar dan tepat waktu, (2) Desa dengan tata kelola aset berbasis IT

7.2. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

**Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

N O	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	n/a	index	0,570	0,640	0,662	0,682	0,702	0,722	0,740	0,740	
2	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Persentase desa dengan perencanaan dan penganggaran yang baik + persentase dengan pengelolaan aset berbasis IT/2	%	44,44	66,60	77,70	83,33	88,89	94,44	100	100	

7.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal RPJMD	Realisasi		Target Pada Perubahan RPJMD 2019-2024				Target Akhir Kinerja RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1.	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	(indeks)	0,570	0,640	0,662	0,682	0,702	0,722	0,740	0,740
2	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	%	44,44	66,60	77,70	83,61	88,89	94,44	100	100
3	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes*	orang	n/a	-	-	150	160	200	210	210
4	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar*	lembaga	n/a	90	100	100	125	150	180	180
5	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar*	sistem pelayanan	n/a	186	186	186	186	186	186	186
6	Jumlah Desa Mandiri*	desa	0	0	0	0	3	6	9	9
7	Jumlah Desa Maju	desa	25	13	18	26	30	35	40	40
8	Jumlah Desa Berkembang*	desa	75	80	162	154	147	139	131	131
9	Jumlah Desa Tertinggal*	desa	65	87	0	0	0	0	0	0
10	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang*	BUMDes	30	39	77	98	104	111	122	122

Program Pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada golongan masyarakat miskin ekonomi lemah dengan cara melakukan Pembinaan, Pelatihan dan keterampilan untuk penguatan usaha ekonomi masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat secara mandiri dan partisipatif mendukung gerak pembangunan demi terwujudnya desa maju dan mandiri.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga diarah kepada partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa, baik dalam pengambilan keputusan, Mengembangkan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan prtisipatif. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- 1) *Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan desa (Indikator Renstra SKPD)*
- 2) *Meningkatnya Tata Kelola administrasi, keuangan, dan aset Desa*

Kedua indikator di atas dirumuskan untuk menunjang program pembangunan Kabupaten Sampang dan sesuai dengan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD)

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu, rencana strategis disusun berdasarkan kebutuhan Pendanaan Indikatif dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Sampang periode 2019 – 2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Disamping itu, perubahan Rencana strategis ini juga menjadi bahan acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

Dengan tersusunnya perubahan Rencana Strategis 2019 – 2024 maka telah jelas dijabarkan arah Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun ke depan. Hal tersebut akan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas dimasa sekarang dan akan datang. Untuk itu Rencana Strategi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan dan bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa depan untuk menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Meski demikian, perubahan Renstra ini sesuai dengan sifatnya, terbuka untuk direvisi sejalan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sampang dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan dan pencapaian hasil – hasil pembangunan di Kabupaten Sampang secara keseluruhan. Akhir kata semoga perubahan Renstra ini bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI